

Efektivitas belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur

Asyifa Azra Royadi¹, Kholiq Hasyadi², Ika Nurhayati³

^{1,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, 60115, Indonesia

¹Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: belanja langsung, belanja tidak langsung, penduduk miskin, regresi data panel

Artikel diterima: 27-12-2022

Artikel direvisi: 10-02-2023

Artikel disetujui: 12-03-2023

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas belanja APBD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan dan mengestimasi seberapa besar tingkat signifikansi belanja langsung dan tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu tahun 2014-2021 yang mencakup 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pendekatan penelitian kuantitatif berdasarkan regresi data panel. Dimana, jumlah penduduk miskin merupakan variabel dependen, sedangkan belanja pemerintah langsung dan tidak langsung sebagai variabel independen. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa belanja pemerintah APBD berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Timur. Sehingga, variabel belanja langsung dan tidak langsung terbukti efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Wilayah Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Keywords: direct spending; indirect spending; poor population; panel data regression



Ciptaan disebarluaskan di bawah
Lisensi Creative Commons
Atribusi-BerbagiSerupa 4.0
Internasional.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the level of effectiveness of APBD spending, both direct and indirect spending on the poverty rate and to estimate how significant the level of significance of direct and indirect spending is on the population in the East Java region. This study uses secondary data in the form of time series data for the years 2014-2021 covering 38 regencies/cities in East Java with a quantitative research approach based on panel data regression. Where, the number of poor people is the dependent variable, while government direct and indirect spending the independent variable. The results of the tests that have been carried out are that the APBD government expenditure has a significant effect on the decrease in the number of poor people in the East Java region. Therefore, direct and indirect expenditure variables have proven effective in overcoming the problem of poverty in the East Java Region.

1. Pendahuluan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Kemiskinan telah menjadi isu penting kebijakan makroekonomi negara-negara dunia. Kemiskinan tidak saja meliputi negara berkembang. Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi pada seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kehidupan. Meliputi sandang, pangan, dan papan alias kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Yao (2007, 13) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi. Penjelasan akan kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya pendapatan, pangan, papan, kesempatan kerja, atau yang berbasis aset fisik seperti hewan ternak dan lahan. Adapun beberapa penyebab terjadinya kemiskinan di negara-negara dunia seperti tingkat kualitas pendidikan yang rendah, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah penduduk yang terus meningkat, dan masalah lain yang masih menjadi tantangan dalam negara berkembang.

Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2022) dan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022), persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 8 tahun (2014-2021) terlihat beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Jawa Timur berada di angka 12,29% , tahun 2015 berada di angka 12,28%, tahun 2016 persentase penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 11,85%, tahun 2017 sebesar 11.20%, tahun 2018 sebesar 10.85%, tahun 2019 sebesar 10.20%, tahun 2020 sebesar 11.46%, dan tahun 2021 sebesar 10.59%.

Kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin tersebut bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya besaran belanja APBD dibanding dengan kebutuhan belanja, tidak tepat sasaran pengguna subsidi di lapangan, dan juga bisa disebabkan oleh terjadinya pandemi COVID-19. Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, maka persentase penduduk miskin akan bertambah.

Melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Karena jika tidak, masalah kemiskinan akan semakin sulit untuk ditangani dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dengan adanya perputaran cepat roda perekonomian diharapkan akan membuka peluang ekonomi baru yang tentunya akan menarik tenaga kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tidak lagi terpuruk pada jurang kemiskinan.

Terdapat banyak variabel yang bisa dipakai untuk mendorong penurunan angka kemiskinan, khususnya di perkotaan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa diantaranya seperti peningkatan mutu Pendidikan, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan, serta dapat dilakukan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan pemerintah daerahnya. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan serta pengangguran, tentunya tidak lepas dari peran serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta kuasa penggunaan anggaran untuk dapat merangsang perekonomian menuju ke arah yang lebih baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tentunya diharapkan akan mempercepat roda perekonomian. Belanja daerah dapat berpengaruh signifikan karena berhubungan dengan hal-hal yang dapat menjadi penyebab kemiskinan (Ishak, 2017).

Dana APBD normalnya digunakan untuk Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Hal-hal tersebut tentunya dapat menambah kesejahteraan masyarakat

daerah. Dan jika jumlah belanja APBD bertambah, maka semakin banyak masyarakat yang sejahtera. APBD dapat bekerja langsung menaikkan pendapatan masyarakat kurang mampu (miskin dan rentan miskin) melalui belanja program pemberdayaan atau padat karya dan dapat melalui fasilitasi pengembangan usaha berskala mikro dan kecil.

Individu, keluarga, atau rumah tangga dari kelompok masyarakat tersebut juga masih dapat memperoleh manfaat lain secara langsung dari belanja APBD, khususnya dari alokasi bantuan ataupun jaminan sosial, dan belanja tidak langsung seperti belanja modal hingga belanja pegawai. Sehingga, dapat diartikan bahwa semakin banyak belanja APBD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang dikeluarkan, semakin menurun jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut.

Dengan mempertimbangkan faktor penyebab lain, studi dari sejumlah daerah mengonfirmasi bahwa peningkatan kualitas perencanaan di daerah sangat memengaruhi perbaikan tingkat penyerapan APBD. Menurut Tasrif (2017), Sebuah perencanaan yang baik bisa mendeteksi sejak awal kemungkinan kegagalan realisasi anggaran. Perencanaan yang baik akan melibatkan proses penetapan tujuan sekaligus cara (modus), tahapan, dan asumsi untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa pengaruh pemerintah melalui APBD nya dalam meningkatkan pertumbuhan, menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Jawa Timur. Apakah belanja APBD dapat dikatakan salah satu cara atau strategi yang efektif atau signifikan dalam menangani masalah kemiskinan di daerah Jawa Timur.

Untuk mengetahui jawaban dari persoalan tersebut, diperlukan beberapa proses analisis yang teliti. Beberapa analisis yang perlu dilakukan adalah analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi dan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, dan melakukan pemilihan model terbaik untuk persoalan tersebut. Hal ini dilakukan agar mendapat

hasil yang akurat sehingga hasil pengujian tepat dan sesuai.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Kemiskinan

Menurut Haughton dan Shahidur (2012:3) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan sendiri merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan. Ini dikarenakan hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah beragam.

2.2 Belanja Pemerintah

Studi lebih lanjut mengenai belanja pemerintah daerah atau APBD dicantumkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Abdul Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki beberapa unsur sebagai berikut: 1) Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci; 2)

Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut; 3) Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

2.3 Belanja Langsung

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program-program yang ada, dan merupakan penjabaran dari kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

2.4 Belanja Tidak Langsung

Menurut Fathony (2021), belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program-program dan kegiatan. Klasifikasi belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Bunga, Subsid, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan yang disalurkan.

3. Metodologi

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur dan dari hasil materi yang didapat serta sumber-sumber lain yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik dan Laporan Realisasi Anggaran dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur serta data pendukung lainnya yang di butuhkan.

3.2 Analisis Regresi

Jenis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier dengan menggunakan *software* STATA sebagai alat analisis untuk melihat pengaruh APBD belanja langsung dan tidak langsung terhadap

variabel Jumlah Penduduk Miskin dan apakah pengaruh APBD terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tersebut signifikan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat hal tersebut dapat dilakukan uji R-Squared:

R-Squared

Digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variable belanja APBD baik langsung maupun tidak langsung dalam model regresi tersebut. Dan seberapa besar perbandingannya dengan variable lain (Ghozali, 2018:179).

Pemilihan Model Terbaik

Common Effect Model (CEM)

Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu (Kuncoro, 2003). Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk pool, mengestimasiya menggunakan bentuk kuadrat terkecil (*Pooled Least Square*).

Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model mengestimasi data panel menggunakan variable dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep (Wahyudi, 2014). Pendekatan *fixed effect* ini didasarkan dengan adanya perbedaan intersep antar individu, namun intersepanya sama antar waktu (*time invariant*).

Random Effect Model (REM)

Adanya *dummy variable* di dalam *Fixed Effect Model* bertujuan untuk mewakili ketidaktahtahuan tentang model yang sebenarnya (Widarjono, 2013). Namun, konsekuensinya derajat kebebasan (*degree of freedom*) berkurang yang akhirnya mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Hal ini diatasi dengan memasukkan parameter-parameter yang berbeda antar individu maupun antar waktu ke dalam error yang dikenal sebagai metode random effect. Model ini mengestimasi data panel dimana

variabel gangguan mungkin akan saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan uji Chow (*Chow Test*). Uji Chow membandingkan antara dua model yaitu *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*. Hasil dari Uji Chow akan menunjukkan model mana yang lebih baik digunakan sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan Uji Chow karena *Fixed Effect Model* adalah *Within Group*. Sedangkan, untuk *Random Effect Model* sulit dibuktikan, hal ini dikarenakan cov dalam persamaan *Random Effect Model* harus sama dengan nol, dan sulit untuk membuktikan hal tersebut.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik dilakukan dengan cara uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi (Ghozali, 2018:107).

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137).

Uji Autokorelasi

Sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu (Suliyanto, 2016). Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke- i dengan observasi ke- $i-1$. Contohnya yaitu: misalkan sampel ke-20, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya.

Jika setelah melakukan uji asumsi klasik didapatkan hasil yang menyatakan bahwa terdapat masalah yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten, tidak bias, dll, maka harus dilakukan regresi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut sehingga data menjadi konsisten, bias, dan memiliki ketepatan hasil estimasi.

4. Hasil

4.1 Hasil Analisis Regresi

Penelitian ini melakukan analisis regresi menggunakan metode *Panel Least Square*. Hasil dari regresi tersebut adalah sebagai berikut:

Source	SS	df	MS	Number of obs =	304
Model	665355.472	2	332677.736	F(2, 301)	= 105.17
Residual	952129.756	301	3163.22178	Prob > F	= 0.0000
				R-squared	= 0.4114
				Adj R-squared	= 0.4074
Total	1617485.23	303	5338.23508	Root MSE	= 56.243

Jumlah_Pdd_Miskin	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
Belanja_Langsung	-5.837087	4.508095	-1.29	0.196	-14.70846 3.034288
Belanja_TidakLangsung	92.4764	7.325111	12.62	0.000	78.06149 106.8913
_cons	11.30692	8.118276	1.39	0.165	-4.668846 27.28268

Gambar 1. Hasil Regresi

R-Squared

Nilai R-squared = 0,4114 , artinya variabel Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mampu menjelaskan model sebesar 41,14%. Sisanya sebesar 58,86% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Namun, dapat dilihat bahwa hasil regresi tersebut tidak akurat. Dapat dilihat dari hasil t-tabel yang menunjukkan hasil tidak signifikan dan juga nilai coefisien yang tidak masuk akal, sehingga diperlukan pemilihan model terbaik yang dapat digunakan dan pengujian untuk melihat apakah terjadi kesalahan dalam data.

Pemilihan Model Terbaik

Chow Test

Digunakan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*. Setelah dilakukan Uji Chow, didapatkan hasil sebagai berikut:

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =   304
Group variable: KabKota              Number of groups =    38

R-sq:                                Obs per group:
    within = 0.1765                    min       =     8
    between = 0.3622                    avg       =    8.0
    overall  = 0.3084                    max       =     8

                                F(2,264)      =   28.30
                                Prob > F          =   0.0000

corr(u_i, Xb) = -0.6555
```

Jumlah_Fdd_Miskin	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
Belanja_Langsung	-6.898073	1.168631	-5.90	0.000	-9.199097 -4.59705
Belanja_TidakLangsung	-13.51333	2.425904	-5.57	0.000	-18.28991 -8.73675
_cons	143.1544	3.442647	41.58	0.000	136.3759 149.933
sigma_u	80.755509				
sigma_e	8.1954297				
rho	.98980589	(fraction of variance due to u_i)			

F test that all u_i=0: F(37, 264) = 376.00 Prob > F = 0.0000

Gambar 2. Hasil Uji Chow

Dimana:

$H_0 = Common\ Effect\ Model$

$H_1 = Fixed\ Effect\ Model$

Dapat dilihat bahwa P-Value (0.0000) < 0.05 yang berarti bahwa P-Value dalam tingkat signifikansi 5 persen hipotesis nol ditolak. Sehingga, model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

VIF atau *Variance Inflating Factor* digunakan untuk melihat apakah terdapat masalah multikolinearitas dalam model. Menerima H_1 atau ada indikasi multikolinearitas tinggi apabila nilai Mean VIF > 10.

Variable	VIF	1/VIF
Belanja_La~g	3.58	0.279133
Belanja_Ti~g	3.58	0.279133
Mean VIF	3.58	

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Mean VIF (3.58) < 10, yang berarti bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model, dimana tidak adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan menggunakan Breusch Pagan test untuk menguji heteroskedastisitas

```
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (38) = 1.0e+06
Prob>chi2 = 0.0000
```

Gambar 4. Hasil Uji Breusch Pagan

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa P-Value (0.0000) < 0.05, artinya, dalam tingkat signifikansi 5 persen, hipotesis nol ditolak, sehingga terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.

Uji Autokorelasi

Dilakukan dengan menggunakan serial autokorelasi

```
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 37) = 4.423
Prob > F = 0.0423
```

Gambar 5. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa P-Value (0.0423) < 0.05. Hal ini berarti bahwa dalam tingkat signifikansi 5 persen, hipotesis nol ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam model.

Karena terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam model, maka harus dilakukan penyelesaian untuk menghilangkan kedua masalah tersebut agar data menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Untuk menghilangkan heteroskedastisitas dan autokorelasi tersebut, dapat menggunakan regresi cluster. Regresi cluster adalah teknik untuk mengambil *Unbiased Standard Error* dari koefisien *Least Square* di bawah masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Regresi Cluster

Fixed-effects (within) regression		Number of obs =	304		
Group variable: KabKota		Number of groups =	38		
R-sq:		Obs per group:	min = 8		
within =	0.1765	avg =	8.0		
between =	0.3622	max =	8		
overall =	0.3084				
corr(u_i, Xb) = -0.6555		F(2,37) =	24.27		
		Prob > F =	0.0000		
(Std. Err. adjusted for 38 clusters in KabKota)					
Jumlah_Pdd_Miskin	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
Belanja_Langsung	-6.898073	1.503321	-4.59	0.000	-9.944092 -3.852055
Belanja_TidakLangsung	-13.51333	2.583742	-5.23	0.000	-18.74849 -8.278174
_cons	143.1544	3.546897	40.36	0.000	135.9677 150.3411
sigma_u	80.755509				
sigma_e	8.1954297				
rho	.98980589	(fraction of variance due to u_i)			

Gambar 6. Hasil Regresi Cluster

Setelah dilakukan regresi cluster, dapat dilihat bahwa data menjadi lebih akurat. Nilai t-tabel (0.0000) < 0.05 menunjukkan bahwa data tersebut signifikan di tingkat signifikansi 5 persen. Selain itu, nilai koefisien variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung juga menjadi lebih masuk akal.

5. Pembahasan

Bentuk Persamaan:

$$\hat{Y} = 143,15 - 6,89x_1 - 13,51x_2$$

Pada hasil perhitungan model terpilih yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1) Konstanta: 143.1544 yang mana berarti bahwa jika variabel dependen yaitu belanja APBD dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di kab/kota di Jawa Timur akan naik sebesar 143.1544 jiwa; 2) Koefisien Variabel Belanja Langsung: -6,89, yang mana berarti bahwa setiap kenaikan belanja langsung dalam APBD Jawa Timur sebanyak 1% akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 6,89 ribu jiwa; 3) Koefisien Variabel Belanja Tidak Langsung: -13,51, yang mana berarti bahwa setiap kenaikan belanja tidak langsung dalam APBD Jawa Timur sebesar 1%, akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 13,51 ribu jiwa.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi Jawa Timur dengan adanya kenaikan variabel belanja APBD dapat disebabkan karena beberapa hal. Seperti, bantuan yang dialokasikan tepat sasaran, sehingga dampak terhadap masyarakat golongan miskin atau kurang mampu dapat merasakan secara langsung manfaat

dari belanja APBD. Selain itu, bisa juga disebabkan karena belanja yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat pada waktu yang bersangkutan dan diberikan secara maksimal. Belanja tidak langsung seperti belanja modal dan belanja jasa juga berakibat pada bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga jumlah penduduk yang tidak berpenghasilan juga berkurang.

6. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja APBD terhadap jumlah penduduk miskin dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Timur dengan rentan waktu 8 (delapan) tahun (2014-2021).

Belanja APBD memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Ini memiliki arti jika jumlah belanja APBD mengalami peningkatan, maka jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Timur akan berkurang secara signifikan. Dibuktikan dengan hasil-hasil pengujian di atas yang memiliki hasil korelasi yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti, belanja APBD yang dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat terutama penduduk miskin sudah tepat sasaran atau target, adanya bantuan sosial yang ditujukan untuk mengatasi kasus kemiskinan secara langsung, belanja APBD berpengaruh dalam perluasan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pengangguran terbuka dan menyejahterakan masyarakat, dan lain-lain.

Baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Namun, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Dilihat dari besarnya koefisien variabel belanja tidak langsung yang didapatkan (-13,51) lebih besar jika dibandingkan dengan koefisien belanja langsung (-6,89).

Saran yang diberikan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi Pemda-Pemda di Jawa Timur untuk mengoptimalkan belanjanya dalam mengatasi kemiskinan di daerahnya masing-masing. Komposisi belanja Pemda turut menentukan besaran penduduk miskin yang dapat diatasi. Oleh karena itu, pemda perlu terus meng-exercise komposisi belanja-nya yang sekiranya akan mampu secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.

Daftar Pustaka

- Abdul, Halim. (2008). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2022). Konsep Penduduk Miskin. Diakses dari: <https://jatim.bps.go.id/>
- Fathony, A. A., Setiawan, D., & Nurhayani, S. (2021). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperin) Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 64-77
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS Edisi Sembilan*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan(Handbook on Poverty and Inequality)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 17(1), 55-59
- Yao, Guevera Assamoi. (2007). *Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence. Economics Dissertations*. Georgia: Georgia State University
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Laporan Realisasi Anggaran. Diakses dari: <https://djpk.kemenkeu.go.id//>
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nurwati, Nunung. (2008). Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 10(1), 1-11
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV.Andi.
- Wahyudi, R., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2014). Analisis Belanja Pemerintah dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 49-59
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia.